



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2011-2015

Diperbanyak oleh:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Sleman



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, serta prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-2015;
- b. bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2011 sampai dengan tahun 2015.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berdasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD; dan
- b. pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Apabila terjadi hal diluar kendali Pemerintah Daerah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Nopember 2010
BUPATI SLEMAN,
cap/ttd
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Nopember 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
cap/ttd.
SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2015

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai amanat dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Berdasarkan hal dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

RPJM Daerah Tahun 2011-2015 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJM tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJM Daerah Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.

Selanjutnya RPJM menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD” adalah keadaan tertentu yang disebabkan antara lain oleh bencana dan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya atau perlu dilakukan penyesuaian terhadap program-program dalam RPJMD yang telah ditetapkan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2010
TANGGAL 1 NOPEMBER 2010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.2.1 Maksud	I-2
1.2.2 Tujuan	I-2
1.3 Landasan Hukum	I-2
1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
1.4.1 Hubungan RPJMD dengan RPJMN	I-4
1.4.2 Hubungan RPJMD dengan RPJPD	I-4
1.4.3 Hubungan RPJMD dengan RTRW	I-4
1.4.4 Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD	I-4
1.4.5 Hubungan RPJMD dengan RKPD	I-5
1.5 Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan	I-5
1.5.1 Kerangka Pikir	I-5
1.5.2 Sistematika Penulisan	I-6
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	 II-1
2.1 Kondisi Fisik	II-1
2.1.1 Geografi	II-1
2.1.2 Karakteristik Wilayah	II-11
2.2 Perekonomian Daerah	II-12
2.2.1 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)	II-12
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-13
2.2.3 Struktur Perekonomian Daerah	II-13
2.2.4 PDRB per Kapita	II-14
2.2.5 Inflasi	II-15
2.2.6 Pertanian	II-16
2.2.7 Peternakan	II-17
2.2.8 Perkebunan	II-17

2.2.9	Perikanan	II-18
2.2.10	Ketahanan Pangan	II-19
2.2.11	Perdagangan	II-20
2.2.12	Perindustrian	II-21
2.2.13	Koperasi	II-22
2.2.14	Penanaman Modal	II-23
2.2.15	Pariwisata	II-23
2.2.16	Ketenagakerjaan	II-25
2.3	Sosial Budaya	II-28
2.3.1	Kependudukan dan Transmigrasi	II-28
2.3.2	Keluarga Berencana	II-31
2.3.3	Kesejahteraan Sosial	II-32
2.3.4	Kesehatan	II-34
2.3.5	Pendidikan	II-37
2.3.6	Pemuda dan Olahraga	II-41
2.3.7	Budaya	II-42
2.3.8	Pemberdayaan Perempuan dan Indeks Pembangunan Gender	II-47
2.3.9	Penanggulangan Bencana	II-48
2.3.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-51
2.4	Prasarana dan Sarana	II-52
2.4.1	Jalan dan Jembatan	II-52
2.4.2	Sumberdaya Air	II-53
2.4.3	Air Bersih	II-54
2.4.4	Sanitasi	II-55
2.4.5	Persampahan dan Drainase	II-56
2.4.6	Perumahan dan Permukiman	II-58
2.4.7	Perhubungan	II-59
2.4.8	Komunikasi dan Informatika	II-60
2.4.9	Energi dan Sumberdaya Mineral	II-61
2.5	Pemerintahan Umum	II-63
2.5.1	Pemerintahan	II-63
2.5.2	Pelayanan Umum	II-64
2.5.3	Hukum	II-66
2.5.4	Keamanan dan Ketertiban	II-67
2.6	Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	II-68
2.6.1	Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten .	II-69

2.6.2	Kebijakan Umum Penataan Ruang	II-69
2.6.3	Rencana Struktur Ruang Wilayah	II-70
2.6.4	Pola Ruang Wilayah	II-73
2.6.5	Kawasan Strategis Wilayah	II-76
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1	Gambaran Umum Keuangan Daerah	III-1
3.1.1	Pendapatan Daerah	III-1
3.1.2	Belanja Daerah	III-4
3.1.3	Pembiayaan Daerah	III-6
3.2	Arah Pengelolaan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1	Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-8
3.2.2	Arah Pengelolaan Belanja Daerah	III-12
3.2.3	Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-14
3.3	Kebijakan Umum Anggaran	III-14
3.3.1	Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	III-14
3.3.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-15
3.3.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-17
3.4	Prediksi Keuangan Daerah	III-18
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Pelayanan Umum	IV-1
4.1.1	Perencanaan Pembangunan	IV-1
4.1.2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	IV-3
4.1.3	Statistik	IV-3
4.1.4	Kearsipan	IV-4
4.1.5	Perpustakaan	IV-4
4.1.6	Komunikasi dan Informatika	IV-5
4.2	Ketertiban dan Keamanan	IV-5
4.2.1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ...	IV-5
4.2.2	Penanggulangan Bencana	IV-6
4.3	Ekonomi	IV-7
4.3.1	Perhubungan	IV-7
4.3.2	Ketenagakerjaan	IV-7

4.3.3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-8
4.3.4	Penanaman Modal	IV-8
4.3.5	Ketahanan Pangan	IV-9
4.3.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-9
4.3.7	Pertanian	IV-10
4.3.8	Kehutanan	IV-11
4.3.9	Perikanan	IV-11
4.3.10	Perdagangan	IV-12
4.3.11	Industri	IV-12
4.3.12	Energi dan Sumberdaya Mineral	IV-13
4.3.13	Ketransmigrasian	IV-14
4.4	Lingkungan Hidup	IV-14
4.4.1	Penataan Ruang	IV-14
4.4.2	Lingkungan Hidup	IV-15
4.4.3	Pertanahan	IV-16
4.5	Perumahan	IV-16
4.5.1	Pekerjaan Umum	IV-16
4.5.2	Perumahan	IV-17
4.6	Kesehatan	IV-18
4.6.1	Kesehatan	IV-18
4.6.2	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..	IV-18
4.7	Pariwisata dan Budaya	IV-19
4.7.1	Kebudayaan	IV-19
4.7.2	Pariwisata	IV-20
4.8	Pendidikan	IV-21
4.8.1	Pendidikan	IV-21
4.8.2	Kepemudaan dan Olahraga	IV-21
4.9	Perlindungan Sosial	IV-22
4.9.1	Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-22
4.9.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-23
4.9.3	Sosial	IV-23
 BAB V	 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	 V-1
5.1	Dasar Filosofi	V-1
5.2	Visi	V-3
5.3	Misi	V-4

5.4	Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai (<i>Core Values</i>)	V-6
5.4.1	Prinsip-prinsip	V-6
5.4.2	Nilai-nilai	V-6
5.5	Analisa Lingkungan	V-7
5.5.1	Analisis Lingkungan Internal	V-8
5.5.2	Analisis Lingkungan Eksternal	V-9
5.6	Analisis Strategi Pilihan	V-10
5.7	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan	V-15
5.8	Tujuan dan Sasaran	V-15
5.8.1	Tujuan	V-16
5.8.2	Sasaran	V-17
 BAB VI	 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 VI-1
6.1	Reorientasi, Reposisi dan Revitalisasi	VI-1
6.1.1	Reorientasi	VI-1
6.1.2	Reposisi	VI-2
6.1.3	Revitalisasi	VI-2
6.2	Strategi	VI-3
6.2.1	Strategi Mewujudkan Misi Satu	VI-3
6.2.2	Strategi Mewujudkan Misi Dua	VI-4
6.2.3	Strategi Mewujudkan Misi Tiga	VI-4
6.2.4	Strategi Mewujudkan Misi Empat	VI-5
6.2.5	Strategi Mewujudkan Misi Lima	VI-5
6.3	Arah Kebijakan	VI-6
6.3.1	Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Satu	VI-6
6.3.2	Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Dua	VI-6
6.3.3	Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Tiga	VI-7
6.3.4	Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Empat	VI-7
6.3.5	Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Lima	VI-7
 BAB VII	 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	 VII-1
7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan	 VII-2
7.2	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan	 VII-2
7.3	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan	

	Urusan Wajib Pekerjaan Umum	VII-3
7.4	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan	VII-4
7.5	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang	VII-5
7.6	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	VII-5
7.7	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan	VII-6
7.8	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup	VII-6
7.9	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan	VII-7
7.10	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	VII-7
7.11	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VII-8
7.12	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	VII-8
7.13	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial	VII-9
7.14	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Tenaga Kerja	VII-9
7.15	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..	VII-10
7.16	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah	VII-10
7.17	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan	VII-11
7.18	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	VII-11
7.19	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	VII-12

7.20	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	VII-12
7.21	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan	VII-14
7.22	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	VII-14
7.23	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik	VII-14
7.24	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan	VII-15
7.25	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	VII-15
7.26	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan	VII-15
7.27	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian	VII-16
7.28	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kehutanan	VII-16
7.29	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	VII-17
7.30	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata	VII-17
7.31	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	VII-18
7.32	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan	VII-18
7.33	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian	VII-19
7.34	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Transmigrasi	VII-19

BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN.....	VIII-1
8.1	Indikasi dan Rencana Program untuk Mewujudkan	

	Misi Satu	VIII-1
8.2	Indikasi dan Rencana Program untuk Mewujudkan Misi Dua	VIII-4
8.3	Indikasi dan Rencana Program untuk Mewujudkan Misi Tiga	VIII-6
8.4	Indikasi dan Rencana Program untuk Mewujudkan Misi Empat	VIII-8
8.5	Indikasi dan Rencana Program untuk Mewujudkan Misi Lima	VIII-10
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1	Pedoman Transisi	X-1
10.2	Kaidah Pelaksanaan	X-1
BAB XI	PENUTUP	XI-1

DAFTAR TABEL

TABEL II-1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman ...	II-2
TABEL II-2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman	II-3
TABEL II-3	Jenis Tanah di Kabupaten Sleman	II-4
TABEL II-4	Kondisi Iklim Tahun 2005-2009	II-5
TABEL II-5	Potensi Mineral / Bahan Galian di Kabupaten Sleman ..	II-7
TABEL II-6	Lokasi dan Jenis Flora dan Fauna di Kabupaten Sleman Tahun 2009	II-8
TABEL II-7	Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara Tahun 2005-2009	II-8
TABEL II-8	Keadaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009.....	II-9
TABEL II-9	Inflasi Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2005-2009.....	II-16
TABEL II-10	Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009.....	II-16
TABEL II-11	Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009.....	II-17
TABEL II-12	Data Perkebunan Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009.	II-18
TABEL II-13	Data Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009 ...	II-19
TABEL II-14	Sektor Impor dan Ekspor Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009.....	II-20
TABEL II-15	Data Perindustrian Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-21

TABEL II-16	Perkembangan Koperasi di Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-22
TABEL II-17	Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi dan Tenaga Kerja	
	Tahun 2005-2009.....	II-23
TABEL II-18	Perkembangan Pariwisata Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009.....	II-24
TABEL II-19	Penduduk Usia Kerja Tahun 2005-2009	II-25
TABEL II-20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-26
TABEL II-21	Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-27
TABEL II-22	Proporsi Penduduk Yang Bekerja Per Lapangan Usaha .	
	Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-28
TABEL II-23	Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman Menurut	
	Jenis Kelamin Tahun 2005-2009.....	II-28
TABEL II-24	Mutasi Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-29
TABEL II-25	Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009.....	II-30
TABEL II-26	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-30
TABEL II-27	Kondisi Transmigran Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-31
TABEL II-28	PUS dan Peserta KB Tahun 2005-2009	II-32
TABEL II-29	Kegiatan KB dan KS Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-32
TABEL II-30	Data PMKS di Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-33
TABEL II-31	Perkembangan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	
	Tahun 2005-2009	II-34
TABEL II-32	Derajat Kesehatan Penduduk Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-35
TABEL II-33	Banyaknya Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kualifikasinya	

	di Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009.....	II-36
TABEL II-34	Banyaknya Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-37
TABEL II-35	Banyaknya Tenaga Pendidik, Sekolah, Kelas, dan Siswa ..	
	Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-38
TABEL II-36	Angka-angka Rasio, Partisipasi, Putus Sekolah dan PLS ..	
	Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-39
TABEL II-37	Data Perkembangan Hasil Belajar Pendidikan	
	Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-40
TABEL II-38	Organisasi Pemuda dan Olah Raga Tahun 2005-2009.....	II-41
TABEL II-39	Data Jenis Kesenian di Kabupaten Sleman Tahun 2009 ...	II-42
TABEL II-40	Data Desa Wisata Budaya di Kabupaten Sleman	II-44
TABEL II-41	Jenis Upacara Adat di Kabupaten Sleman	II-45
TABEL II-42	Nilai-nilai yang Berkembang di Kabupaten Sleman	II-45
TABEL II-43	Candi dan Situs di Kabupaten Sleman	II-46
TABEL II-44	Museum yang Ada di Kabupaten Sleman	II-47
TABEL II-45	Data Indeks Pembangunan Gender	II-48
TABEL II-46	Data Indeks Pemberdayaan Perempuan	II-48
TABEL II-47	Jalan Evakuasi Bencana Kabupaten Sleman	II-50
TABEL II-48	Jumlah, Lokasi, Ukuran dan Luas Barak Pengungsi di	
	Kabupaten Sleman	II-51
TABEL II-49	Prasarana Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong	
	Tahun 2005-2009	II-53
TABEL II-50	Pembagian Luas Daerah Irigasi	II-53
TABEL II-51	Data Perkembangan Sarana dan Pemakaian Air Bersih ...	
	Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-55
TABEL II-52	Kondisi Persampahan dan Drainase Kabupaten Sleman .	
	Tahun 2005-2009	II-57
TABEL II-53	Perkembangan Sarana Telekomunikasi Tahun 2005-2009	II-60
TABEL II-54	Energi Baru-Terbarukan Tahun 2005-2009	II-62

TABEL II-55	Potensi dan Produksi Sumberdaya Mineral	
	di Kabupaten Sleman Tahun 2009	II-63
TABEL II-56	Banyaknya PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun 2009	II-64
TABEL II-57	Kejadian Gangguan Keamanan dan Ketertiban	
	Tahun 2005-2009	II-67
TABEL II-58	Kedaaan Infrastruktur Politik di Kabupaten Sleman	
	Tahun 2005-2009	II-68
TABEL III-1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman ..	
	Tahun Anggaran 2004-2009	III-2
TABEL III-2	Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan	
	Pembangunan Tahun 2004-2009	III-3
TABEL III-3	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sleman	
	Tahun Anggaran 2004-2009	III-4
TABEL III-4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman	
	Tahun 2004-2009	III-7
TABEL III-5	Neraca Konsolidasi Tahun 2008 dan	
	per 31 Desember 2009	III-10
TABEL III-6	Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman	
	Tahun 2011-2015	III-18
TABEL VIII-1	Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Satu	VIII-1
TABEL VIII-2	Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Dua.....	VIII-4
TABEL VIII-3	Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Tiga	VIII-6
TABEL VIII-4	Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Empat	VIII-8
TABEL VIII-5	Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Lima	VIII-10

TABEL IX-1	Indikator Kinerja Daerah Menurut Sasaran Strategis	IX-1
TABEL IX-2	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Pembangunan Makro Daerah Tahun 2011-2015	IX-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar I.2	Kerangka Pikir Dasar Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015	I-6
Gambar II-1	Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009 (Milyar Rupiah)	II-12
Gambar II-2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-13
Gambar II-3	Struktur Perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-14
Gambar II-4	PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-15
Gambar II-5	Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-36
Gambar II-6	Kebutuhan Rumah di Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009	II-58
Gambar II-7	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sleman	II-72
Gambar II-8	Peta Kawasan Lindung Kabupaten Sleman	II-74
Gambar II-9	Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Sleman	II-76

